

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desentralisasi atau pendelegasian kewenangan dan kekuasaan kepada pemerintah daerah salah satunya bertujuan untuk mencapai *good governance* yang transparan dan akuntabel. Proses desentralisasi politik terjadi ketika pemerintah pusat mendelegasikan dan menyalurkan kekuasaan tersebut kepada pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah sebagai penguasa di daerah tersebut tentu saja harus mempertanggung jawabkan kekuasaannya. Proses ini juga terjadi ketika konstituen dalam hal ini legislatif menetapkan dan mensahkan kebijakan yang diusulkan oleh eksekutif. Hirarki ini menunjukkan bahwa melalui pemerintah pusat, birokrasi Indonesia telah dipindahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah. Jadi dengan adanya pelimpahan ini, pemerintah pusat telah memberi keleluasaan dan mendorong pembangunan kepada daerah. Artinya bahwa pemerintah daerah dapat mengelola daerahnya sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah pusat, dan pembangunan daerah tersebut wajib dibiayai sendiri melalui penggalan optimal sumber-sumber daya yang dimiliki.

Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, memenuhi kebutuhan masyarakat dan membiayai pembangunan, dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dan menjadi indikator kemandirian daerah. Sebagai salah satu indikator kemandirian daerah disamping indikator-indikator lainnya Pendapatan Asli Daerah dapat dijadikan acuan dalam menyusun rencana pembangunan. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang dipungut maka akan meningkatkan alokasi Pendapatan Asli Daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah sehingga akan semakin mendorong pembangunan ekonomi di daerah tersebut.

Untuk membuktikan keseriusan pemerintah pusat terhadap pengalihan kekuasaan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi ditandai dengan terbitnya undang-undang yang khusus mengatur tentang sumber-sumber penerimaan daerah, pemerintah daerah wajib mengusahakan sendiri sumber-sumber penerimaannya untuk dapat membiayai pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Efek yang nyata dari terlaksananya proses desentralisasi ini adalah dapat mengurangi tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat.

Tabel 1.1. Tax Ratio Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2017 (%)

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	rata-rata
1	Aceh	0,78	0,74	0,79	1,09	1,35	1,54	1,51	1,53	1,17
2	Sumatera Utara	0,77	0,84	0,97	0,87	0,85	0,85	0,79	0,72	0,83
3	Sumatera Barat	0,96	0,92	0,93	0,93	1,05	1,04	1,00	0,96	0,97
4	Riau	0,34	0,31	0,46	0,45	0,48	0,53	0,46	0,53	0,45
5	Jambi	0,76	0,55	0,87	0,82	0,88	0,80	0,70	0,73	0,76
6	Sumatera Selatan	0,71	0,69	0,79	0,72	0,79	0,76	0,72	0,79	0,75
7	Bengkulu	1,24	1,31	1,34	1,29	1,48	1,39	1,32	1,49	1,36
8	Lampung	0,74	0,64	0,90	0,87	0,99	0,89	0,85	0,90	0,85
9	Bangka Belitung	0,92	0,78	0,97	0,98	1,00	0,94	0,88	0,97	0,93
10	Kepulauan Riau	0,47	0,35	0,50	0,56	0,59	0,51	0,48	0,48	0,49
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	0,80	0,62	0,88	0,98	1,09	1,05	1,03	0,92	0,92
13	Jawa Tengah	0,77	0,60	0,88	0,99	1,07	1,08	1,06	1,02	0,93
14	DIY	1,14	0,98	1,30	1,43	1,58	1,57	1,52	1,39	1,36
15	Jawa Timur	0,75	0,68	0,78	0,84	0,94	0,91	0,85	0,74	0,81
16	Banten	0,86	0,68	1,00	1,09	1,14	1,04	1,05	1,01	0,98
17	Bali	1,49	1,19	1,73	1,88	1,87	1,72	1,57	1,52	1,62
18	Nusa Tenggara Barat	0,73	1,04	1,08	1,17	1,37	1,30	1,17	1,21	1,13
19	Nusa Tenggara Timur	0,68	0,70	0,84	0,86	1,11	1,16	1,19	1,11	0,96
20	Kalimantan Barat	0,90	0,76	1,09	1,14	1,23	1,16	1,03	0,94	1,03
21	Kalimantan Tengah	0,89	1,01	1,29	1,33	1,39	1,17	1,03	1,06	1,15
22	Kalimantan Selatan	1,51	1,41	2,36	2,16	2,27	1,96	1,71	2,01	1,92
23	Kalimantan Timur	0,65	0,51	0,98	1,13	1,26	0,96	0,79	0,67	0,87
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	0,81	0,79	0,99	1,11	1,16	1,11	0,98	0,98	0,99
26	Sulawesi Tengah	0,80	0,54	0,87	0,83	0,91	0,84	0,78	0,68	0,78
27	Sulawesi Selatan	0,90	0,90	0,96	0,99	1,02	0,96	0,91	0,90	0,94
28	Sulawesi Tenggara	0,70	0,76	0,68	0,72	0,76	0,76	0,78	0,69	0,73
29	Gorontalo	0,86	0,71	0,92	0,97	1,12	1,02	0,98	1,03	0,95
30	Sulawesi Barat	0,52	0,55	0,62	0,61	0,76	0,83	0,77	0,76	0,68
31	Maluku	0,92	1,04	1,08	1,09	1,34	1,14	1,62	1,30	1,19
32	Maluku Utara	0,52	0,47	0,60	0,77	0,84	0,89	0,96	1,51	0,82
33	Papua Barat	0,30	0,22	0,37	0,45	0,53	0,51	0,51	0,56	0,43
34	Papua	0,34	0,28	0,55	0,49	0,71	0,61	0,59	0,69	0,53
	rata-rata	3,19	2,95	3,80	3,95	4,37	4,13	3,95	3,98	3,79

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Dapat dilihat bahwa *tax ratio* yang dihasilkan dari perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan PDRB perkapita pada 32 Provinsi di Indonesia menunjukkan trend (kecenderungan) meningkat meskipun perbandingan PAD/PDRB ini masih berada di bawah rata-rata nasional 3,79%. Hasil perhitungan ini tidak memasukkan Provinsi DKI Jakarta yang memiliki jenis pungutannya mencakup penerimaan kabupaten/kota serta Provinsi Kalimantan Utara yang belum terbentuk. Selanjutnya rasio rata-rata PAD/PDRB perkapita pada 3 (tiga) Provinsi tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan 1,92%, Provinsi Bali 1,62% serta Provinsi DIY dan Provinsi Bengkulu 1,36%, sedangkan 3 (tiga) Provinsi dengan perbandingan Pendapatan Asli Daerah dan PDRB perkapita terendah adalah Provinsi Papua Barat 0,43%, Provinsi Kepulauan Riau 0,49% dan Provinsi Papua 0,53%.

Adapun sumber penerimaan tiga provinsi yang memiliki rasio PAD/PDRB harga berlaku tertinggi ini berasal dari penerimaan melalui obyek wisata, sedangkan sumber penyebab rendahnya rasio Pendapatan Asli Daerah perkapita dan PDRB harga berlaku pada Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua disinyalir disebabkan karena merupakan provinsi pemekaran dari Provinsi Irian Jaya sehingga belum memiliki sumber penerimaan yang mapan sedangkan Kepulauan Riau merupakan pemekaran dari Provinsi Riau.

Pada tahun 2012 menunjukkan fenomena yang cukup jarang terjadi dimana PAD perkapita secara nasional meningkat, hal ini dapat disebabkan oleh berlakunya kebijakan perluasan objek pajak dari kendaraan bermotor milik pemerintah, pemerintah daerah dan TNI/Polri. Disamping itu peningkatan secara nasional ini juga berasal dari penerimaan pemberlakuan tarif pajak progresif yang sebelumnya bebas dari pungutan pajak.

Jelas dapat dikatakan bahwa dalam kurun waktu delapan tahun setiap terjadi peningkatan maupun penurunan PAD juga diikuti oleh peningkatan maupun penurunan PDRB provinsi di Indonesia. Artinya bahwa semakin tinggi PDRB per kapita menunjukkan bahwa semakin tingginya penerimaan PAD, masyarakat mempunyai kemampuan dan kesediaan untuk membayar pajak dan kewajiban keuangan lainnya dan sebaliknya jika terjadi penurunan PAD yang berakibat langsung kepada PDRB.

Lalu faktor apa yang membuat pendapatan asli daerah itu berbeda antar satu provinsi dengan provinsi lainnya. Perbedaan nilai pendapatan asli daerah tersebut yang bervariasi antar provinsi di Indonesia baik yang berada pada pulau yang sama tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Halim (2004) terdapat 2 (dua) faktor yang menjadi penyebab PAD suatu daerah berbeda, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. PDRB, investasi, inflasi, dan jumlah penduduk merupakan beberapa faktor eksternal yang akan mempengaruhi besarnya PAD suatu daerah, sedangkan sarana dan prasarana, insentif, penerimaan subsidi, penerimaan pembangunan, sumber daya manusia, peraturan daerah, sistem dan pelaporan merupakan faktor internal yang akan mempengaruhi besarnya PAD.

Di sisi lain, desentralisasi fiskal yang ditentukan oleh PAD juga akan dipengaruhi secara langsung oleh faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Artinya bahwa Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) suatu provinsi akan meningkat jika Pendapatan Asli Daerah yang dipungut meningkat dengan catatan bahwa jenis penerimaan lain selain Pendapatan Asli Daerah semakin rendah.

Diketahui bahwa PAD perkapita tertinggi selama delapan tahun pengamatan dari tahun 2010 sampai dengan 2017 diperoleh oleh Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 1.359.050, Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 606.078 dan Provinsi Bali sebesar Rp.

597.257. Adapun sumber penerimaan potensial ketiga provinsi ini berasal dari sumber daya alam dan obyek wisata yang dikenal di manca negara. Sedangkan PAD perkapita Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar Rp. 130.168, Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp. 154.863 dan Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 178.199 merupakan provinsi yang termasuk kelompok yang memiliki PAD perkapita terendah. Rendahnya PAD pada tiga provinsi ini disebabkan jika dengan membandingkan PAD perkapita provinsi tetangga yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Bali yang memiliki primadona sumber penerimaan melalui obyek wisata. Sedangkan Provinsi Sulawesi Barat merupakan daerah baru yang dimekarkan dari Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara merupakan daerah baru yang dimekarkan dari Provinsi Maluku.

Tiga provinsi dengan nilai tertinggi Total Penerimaan Daerah (TPD) per kapita periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 adalah Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 6.987.370, Provinsi Kalimantan Timur Rp. 3.315.642, Provinsi Provinsi Papua Rp. 3.292.682, sedangkan 3 (tiga) provinsi dengan Total Penerimaan Daerah perkapita terendah yaitu Provinsi Jawa Tengah Rp. 458.181, Provinsi Jawa Barat Rp. 511.824, Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 539.576.

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa rata-rata derajat desentralisasi fiskal yang tertinggi diperoleh oleh Jawa Timur 58,95%, diikuti oleh Provinsi Banten dengan Derajat Desentralisasi Fiskal 57,83% dan Provinsi Jawa Tengah 55,64%, sedangkan derajat desentralisasi fiskal terendah diperoleh oleh Provinsi Papua Barat sebesar 4,06%, Provinsi Papua 7,16% dan Provinsi Aceh sebesar 12,16, sedangkan derajat desentralisasi fiskal provinsi lainnya berkisar antara 7% sampai dengan 57,83%.

Tabel 1.2. Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2017 (%)

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	rata-rata
1	Aceh	9,05	8,94	8,44	10,49	13,31	15,75	16,28	15,03	12,16
2	Sumatera Utara	60,37	59,33	51,15	55,20	56,46	57,49	45,14	36,75	52,73
3	Sumatera Barat	38,80	45,16	37,32	39,89	44,61	43,38	40,28	32,13	40,20
4	Riau	30,02	25,63	29,57	30,38	33,86	31,92	30,87	40,40	31,58
5	Jambi	37,29	23,49	30,29	29,74	34,82	34,44	35,26	30,39	31,97
6	Sumatera Selatan	38,74	35,91	35,11	33,70	38,54	42,03	38,42	36,61	37,38
7	Bengkulu	34,71	34,93	27,49	27,10	30,60	28,79	29,36	27,46	30,06
8	Lampung	51,52	40,36	43,73	45,12	49,80	45,88	41,62	39,19	44,65
9	Bangka Belitung	29,50	22,09	26,94	27,33	29,30	25,84	25,10	27,50	26,70
10	Kepulauan Riau	24,91	19,99	26,16	27,04	30,95	38,20	36,44	31,33	29,38
11	DKI Jakarta									
12	Jawa Barat	62,89	46,78	50,21	55,75	58,07	56,13	54,37	46,53	53,84
13	Jawa Tengah	63,54	47,60	53,45	56,06	58,86	58,89	57,56	49,15	55,64
14	DIY	45,39	37,67	40,73	40,72	41,50	40,73	39,20	31,39	39,67
15	Jawa Timur	62,44	58,32	57,54	60,63	63,85	62,41	59,63	46,78	58,95

16	Banten	68,79	48,45	58,67	61,65	60,20	53,84	55,82	55,20	57,83
17	Bali	50,20	37,12	46,20	50,51	51,99	51,78	51,34	50,17	48,66
18	Nusa Tenggara Barat	38,29	41,60	33,00	35,65	39,78	37,68	32,78	27,70	35,81
19	Nusa Tenggara Timur	22,72	23,76	18,91	20,04	25,25	24,71	24,63	20,13	22,52
20	Kalimantan Barat	39,82	30,13	35,11	38,67	42,15	40,46	36,96	30,10	36,67
21	Kalimantan Tengah	31,25	32,37	31,88	32,47	34,94	33,13	32,28	30,08	32,30
22	Kalimantan Selatan	46,39	40,09	47,36	45,05	51,25	48,81	44,63	53,41	47,12
23	Kalimantan Timur	34,57	23,03	36,74	39,68	54,01	51,85	49,06	45,49	41,80
24	Kalimantan Utara									
25	Sulawesi Utara	27,81	30,63	31,31	34,11	36,48	35,94	32,86	27,66	32,10
26	Sulawesi Tengah	30,40	19,96	27,90	29,04	31,86	29,79	28,87	24,66	27,81
27	Sulawesi Selatan	55,31	52,40	47,32	51,02	51,84	50,98	47,30	40,39	49,57
28	Sulawesi Tenggara	29,22	28,33	23,93	23,66	23,80	23,11	23,20	18,44	24,21
29	Gorontalo	20,22	15,45	18,06	18,61	21,66	19,61	18,83	19,48	18,99
30	Sulawesi Barat	14,24	14,78	14,36	13,11	16,33	18,56	15,30	15,12	15,23
31	Maluku	16,77	18,60	17,66	17,96	22,24	16,96	21,22	18,25	18,71
32	Maluku Utara	11,14	8,47	8,30	11,51	13,25	12,72	13,59	21,05	12,50
33	Papua Barat	3,56	2,44	4,11	3,93	4,32	4,30	4,67	5,14	4,06
34	Papua	6,55	4,23	7,56	6,55	8,19	7,03	7,80	9,33	7,16
	rata-rata	35,51	30,56	32,08	33,51	36,69	35,72	34,08	31,33	33,69

Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Fenomena yang terjadi dapat dilihat pada Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki PAD perkapita tinggi namun diikuti oleh TPD perkapita yang tinggi pula jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, artinya bahwa Provinsi Kalimantan Timur masih tinggi menggantungkan atau membutuhkan sumber dana pembiayaan pembangunan daerahnya terhadap dana yang bersumber dari pemerintah pusat. Selanjutnya provinsi yang berada di Pulau Jawa dideskripsikan rata-rata memiliki nilai yang tinggi Derajat Desentralisasi Fiskal seperti Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Tengah, meskipun PAD perkapita provinsi dimaksud tidak otomatis termasuk dalam kelompok PAD perkapita tinggi.

Ternyata setelah beberapa tahun desentralisasi fiskal, terbentuknya daerah otonom, dan meskipun dengan selalu terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah setiap tahun tidak serta merta menjadikan Provinsi dimaksud memiliki derajat desentralisasi fiskal yang seharusnya. Padahal meningkatnya derajat desentralisasi fiskal seyogyanya mengikuti meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Ketidaksiharian arah meningkatnya pendapatan asli daerah yang tidak selalu menyebabkan meningkatnya derajat desentralisasi fiskal menunjukkan adanya indikasi bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah dan derajat desentralisasi fiskal daerah tersebut. Maksudnya adalah terdapat daerah yang pendapatan asli daerahnya meningkat tetapi dengan kondisi derajat desentralisasi fiskal yang rendah, dan sebaliknya, jika suatu daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang rendah namun memiliki derajat desentralisasi fiskal yang tinggi.

Dengan demikian, perlu diketahui faktor apa yang mempengaruhi dan kebijakan apa saja yang ditetapkan pemerintah daerah sehingga dapat menstimulasi peningkatan pendapatan

asli daerah dan menjadikan pendapatan asli daerah dan derajat desentralisasi fiskal berbeda antar satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya.

Berbagai peneliti telah melakukan banyak kajian agar diketahui pengaruh faktor yang dominan terhadap besar kecilnya pendapatan asli daerah yang memberikan implikasi kepada derajat desentralisasi fiskal daerah. Namun pendekatan ekonomi sering digunakan dalam banyak kajian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah dibandingkan dengan faktor-faktor yang termasuk dalam kelompok pendekatan non ekonomi. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten/Kota di Indonesia misalnya menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dipengaruhi dengan arah positif dan signifikan oleh faktor-faktor yang menggunakan indikator makroekonomi seperti PDRB, pengeluaran pemerintah, investasi, pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk. Sehingga sering indikator makroekonomi yang digunakan tersebut dikelompokkan kedalam faktor ekonomi.

Sukirno (2010) mengkritik kelemahan analisis makroekonomi dimana faktor ekonomi dan peranan modal dalam pembangunan terlalu diagungkan, sedangkan peranan faktor-faktor bukan ekonomi (non-ekonomi) sering diabaikan. Tidak adanya analisis terhadap pengaruh keadaan sosial, struktur sosial, suasana politik, nilai-nilai hidup, corak pandangan masyarakat dan corak kebudayaan masyarakat. Dalam hal pungutan pajak misalnya kenyataannya memang ada faktor lain yang mempengaruhi kesediaan dan tingkah laku masyarakat/badan usaha dalam membayar pajak, salah satunya adalah faktor non ekonomi tersebut.

Senada dengan yang disampaikan oleh Sukirno, Bardhan (2016) secara jelas juga mengkritik literatur-literatur pembangunan yang menekankan kepada peran negara, dimana negara harus cukup kuat untuk memberikan batas minimal hukum, penegakan perjanjian, dan lembaga dasar lainnya yang menopang pasar. Artinya peran negara selama ini hanya lebih menitikberatkan kepada hasil yang memberikan insentif terhadap investasi, perusahaan dan pembangunan, seolah 'kekuatan negara' hanya pada aspek kapasitas fiskal, hukum dan militer saja. Padahal pada waktu yang bersamaan negara harus juga menjamin keamanan hak milik masyarakatnya. Dalam tulisannya itu Bardhan juga menyebutkan beberapa kompleksitas yang diabaikan dan tidak menjadi perhatian literatur kelembagaan-ekonomi pembangunan yaitu mengabaikan kapasitas negara dalam menyelesaikan kegagalan koordinasi, pembangunan koalisi politik, komitmen dan akuntabilitas yang saling bertentangan dan tata kelola desentralisasi dalam mengejar tujuan pembangunan.

Mengingat pendapatan asli daerah dan desentralisasi fiskal cukup besar dipengaruhi oleh unsur politis dan administrasi perpajakan, maka peneliti mengelompokkan faktor yang menggunakan selain pendekatan ekonomi kedalam faktor non ekonomi. Pengelompokkan ini

memiliki alasan yang objektif yaitu adalah bahwa faktor non ekonomi merupakan fenomena ekonomi yang akan mendorong dan berpengaruh pada pendekatan ekonomi.

Adapun faktor non ekonomi yang digunakan selain unsur politik adalah demokrasi, korupsi dan tata kelola pemerintahan. Faktor demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang melibatkan peran masyarakat yang bertujuan untuk memudahkan musyawarah dalam pengambilan kebijakan dalam segala aspek pemerintahan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah, atau Presiden telah dipilih melalui Pemilu oleh masyarakat yang mempunyai semangat dan animo yang tinggi. Sehingga diharapkan dengan terwakilinya masyarakat dalam legislatif maupun pimpinan pemerintahan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sebaliknya rendahnya keinginan masyarakat dalam mengikuti proses demokrasi ini menunjukkan tidak adanya kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang dilaksanakan, daya beli lemah, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat menurun. Akcay (2006) menyatakan bahwa terdapatnya hak politik akan membantu orang atau warga negara dalam berpartisipasi secara bebas, dimana hak politik ini meliputi hak untuk memilih dan berkompetisi dalam jabatan publik serta untuk memilih wakil-wakil di lembaga perwakilan.

Berdasarkan uraian latar belakang, studi ini menjadi menarik untuk dilakukan kajian terhadap pendapatan asli daerah yang dipengaruhi oleh faktor non ekonomi yang meliputi demokrasi, politik, korupsi dan tata kelola pemerintahan di provinsi di Indonesia dan proses Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh faktor non ekonomi di Provinsi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang, maka penulis menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor non ekonomi mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi di Indonesia?
2. Bagaimana proses faktor non ekonomi dalam mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulis menetapkan tujuan dalam penelitian ini yang didasarkan atas rumusan masalah yang diajukan yaitu:

1. Mendeskripsikan faktor non ekonomi yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi di Indonesia.

2. Mengetahui proses faktor non ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Akademisi dan Ilmu pengetahuan

Dapat menambah referensi, literatur, wawasan pengetahuan dibidang ilmu ekonomi publik, ekonomi makro, dan ilmu ekonomi perencanaan pembangunan terutama di bidang keuangan negara/daerah seperti partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi, minimalisasi korupsi dan peningkatan kinerja pemerintah daerah.

2. Pengambil Kebijakan

Dapat dijadikan pertimbangan dan masukan dalam merumuskan kebijakan penerimaan bagi Pemerintah Pusat khususnya dan kebijakan penganggaran bagi Pemerintah Daerah, sehingga kebijakan yang ditetapkan dapat menjadi acuan yang akan menstimulasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah,

3. Untuk masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui bahwa faktor non ekonomi seperti demokrasi, politik, korupsi, dan tata kerja pemerintah dapat mempengaruhi penerimaan pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, pelaksanaan pembangunan dan kinerja pemerintah.



